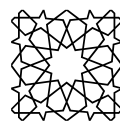


KONTINUITAS DAN PERUBAHAN PENDIDIKAN PESANTREN (Kasus Pondok Pesantren Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta)

Sabaruddin

Jln. Wonosari KM. 8,5 Gandu Sedangtirto, Berbah
Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, 08121584057



ABSTRACT

Education and society are two unseperable things. Both need and influence each other. Everything in the society changes. The changes should be respoused espicially by educational institutions. Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) from time to time changes itself to response what happened to internal Muhammadiyah people.

This article tries to describe critically the growth of education at PUTM intended to maintaim its existence and continuity to form the tarjih intellectuals in the middl of its people whose thught has been formed by formality pattern.

Keywords: Kontinutitas, perubahan pendidikan, tarjih Muhammadiyah

I. Pendahuluan

Sejak dilancarkannya modernisasi pendidikan Islam di berbagai kawasan Dunia Muslim, termasuk Indonesia, tidak banyak lembaga pendidikan tradisional Islam seperti pesantren yang mampu bertahan. Banyak lembaga pendidikan pesantren kemudian lenyap akibat tergusur oleh ekspansi sistem pendidikan umum. Ada juga yang mengalami transformasi menjadi lembaga pendidikan umum, atau minimal menyesuaikan diri dan mengadopsi sedikit banyak isi dan metodologi pendidikan umum.¹

¹ Menurut Azyumardi Azra, ada beberapa cara yang dilakukan pesantren dalam menghadapi perubahan sosial. Pertama, pembaharuan substansi atau isi pendidikan dengan merevisi kurikulumnya dengan memasukkan semakin banyak mata pelajaran umum atau bahkan ketrampilan umum. Kedua, pembaharuan metodologi, seperti sistem klasikal, penjenjangan. Ketiga, pembaharuan kelembagaan, dengan membuka kelembagaan dan fasilitas-fasilitas

Namun demikian bukan berarti modernisasi pendidikan benar-benar mematikan pola pendidikan tradisional (pesantren). Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, yang sejak tahun 1990-an gencar melakukan modernisasi pendidikan Islam, ternyata juga tidak meninggalkan sama sekali pola pendidikan pesantren sebagai media kaderisasi.

Gejala yang belakangan menarik adalah kecenderungan PP. Muhammadiyah yang semakin menaruh perhatian pada pendidikan pondok pesantren sebagai media alternatif untuk melakukan kegiatan pendidikan Islam. Hal ini bisa dicermati dari perhatian Pengurus Pusat Muhammadiyah, terutama PP. Tarjih kepada Pondok Pesantren Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) Yogyakarta. Dikatakan menarik karena selama ini Muhammadiyah lebih banyak menaruh perhatian kepada lembaga pendidikan umum yang bercirikan Islam, dibanding dengan lembaga pendidikan pesantren.

Faktor inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelusuran lebih jauh terhadap pondok pesantren Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta. Pertanyaan-pertanyaan yang dicoba dijawab dalam tulisan ini adalah: (1) apa yang melatar belakangi berdirinya pondok pesantren Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta?; (2) mengapa pondok pesantren Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta dapat eksis dan tetap mampu melaksanakan kegiatan pendidikan di tengah kondisi masyarakat Muhammadiyah yang semakin formalistik; (3) perubahan-perubahan apa saja yang dilakukan oleh pondok pesantren Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah dalam upaya menjaga eksistensi dan kontinuitas pendidikan yang telah sekian lama diselenggarakannya.

II. Pertumbuhan dan Perkembangan PP. PUTM

1. PP. PUTM di Masa Awal (1968-1990)

Pondok Pesantren Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah berlokasi di jalan Kaliurang km.23 Ngipiksari, Ngemplak, Sleman Yogyakarta. Lokasi pondok pesantren berada persis di sebelah timur jalan Kaliurang. Lokasi tersebut tidak jauh dari pintu gerbang masuk ke taman

pendidikannya bagi kepentingan pendidikan umum. Keempat, pembaharuan fungsi, dari fungsi kependidikan untuk juga mencakup fungsi sosial-ekonomi. Oleh karenanya tidak sedikit pesantren yang mengarahkan para santrinya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan vocational dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan umum yang berada di bawah sistem Departemen Pendidikan Nasional; bukan sistem pendidikan agama yang berada di bawah Departemen Agama. Lihat, Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 102-105

wisata Kaliurang (\pm 25 meter). Dengan lokasi pesantren yang berada ditepi jalan, maka tidak sulit bagi yang berkepentingan dengan Pesantren PUTM untuk menuju ke lokasi pesantren. Apalagi di sebelah selatan pesantren, sekitar 50 meter, di sebelah barat jalan Kaliurang juga berdiri megah gedung Pertemuan Muhammadiyah, yang sering digunakan sebagai tempat aktivitas bagi para pengurus maupun anggota (kader) Muhammadiyah. Lokasi pesantren yang berada di tepi jalan Kaliurang memang terkesan jauh dari pemukiman warga masyarakat. Tetapi jika sedikit masuk ke sebelah utara atau timur pesantren, maka akan didapati pemukiman warga yang cukup padat. Demikian pula untuk pemukiman warga yang ada di sebelah barat jalan Kaliurang.

Berdirinya PUTM dilatarbelakangi oleh kegelisahan Kyai Haji Umar Afandi yang melihat semakin langkanya ulama di lingkungan Muhammadiyah. Ia juga merasa prihatin dengan banyaknya ulama, terutama di kalangan Muhammadiyah, yang sudah udzur. Sementara di sisi lain generasi muda Muhammadiyah miskin pengetahuan dalam penguasaan kitab-kitab berbahasa Arab. Maka beliau bersikeras ingin memberikan bekal kepada generasi muda Muhammadiyah, dengan pengetahuan baca dan faham kitab.

Pada tahun 1968 ketika Ketua PP. Muhammadiyah, K.H.M. Faqih Usman, meninggal dunia, jabatan Ketua PP Muhammadiyah dilanjutkan KH. Abdur Rozak Fachrudin, yang dikenal dengan sebutan pak AR. Fachrudin.² Pada periode kepengurusan tersebut Ketua PP. Majelis Tarjih dipegang oleh KH. R.M. Wardan Diponegoro³. KH. Umar Afandi juga direkrut menjadi anggota PP. Majelis Tarjih bersama dengan para kyai lain.

² Panitia Mukhtar Muhammadiyah ke 42, Buku Panduan Mukhtar Muhammadiyah ke 42, 15-19 Desember 1990 di Yogyakarta, hlm. 43

³ KH.R. Moh. Wardan Diponegoro adalah putra dari Kiai Penghulu Kanjeng Raden Haji Muhammad Kamaludiningrat, seorang Penghulu Kraton Yogyakarta sejak tahun 1914 sampai dengan 1940, dan pendukung gerakan KHA. Dahlan. Sejak kecil Moh. Wardan dididik dilingkungan Muhammadiyah, sejak dari Standar School Muhammadiyah di Suronatan, kemudian melanjutkan ke Kweekschool Muhammadiyah (sekarang menjadi Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah). Setamat dari Kweekschool (1930) Moh. Wardan menuntut ilmu di Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta (1931-1934). Kiprahnya dalam Muhammadiyah, pernah mengajar di sekolah Muballighin Muhammadiyah (1936-1945); Akademi Tabligh Muhammadiyah (1966-1974); sejak tahun 1960 aktif di Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah, bahkan sejak tahun 1963-1985 menjabat sebagai ketua (22 tahun); sejak tahun 1985 menjadi Penasehat PP. Muhammadiyah sampai beliau wafat. Dikutip dari dokumen "Naskah Ensiklopedi Muhammadiyah Jilid II I-N", (Yogyakarta: Majelis Pustaka PP. Muhammadiyah, 2000), hal. 312-315

Ketika menjadi anggota PP. Majelis Tarjih, KH. Umar Afandi dan para kyai yang duduk di Majelis Tarjih PP Muhammadiyah sebenarnya sudah berpikir untuk mendirikan lembaga khusus yang akan melakukan pendidikan untuk calon-calon ulama. Gagasan tersebut dilatarbelakangi oleh keprihatinan KH. Umar Afandi terhadap kondisi ulama/kyai ahli fiqh di lingkungan Muhammadiyah yang semakin berkurang karena banyak yang dipanggil menghadap ke hadirat Ilahi.⁴ Maka KH. Umar Afandi memandang penting adanya lembaga yang secara khusus diorientasikan untuk melakukan kaderisasi ulama tarjih di lingkungan Muhammadiyah.

Pada saat itu di lingkungan Muhammadiyah telah berdiri beberapa lembaga yang *nota bene* merupakan lembaga pendidikan kader. K.H.A. Dahlan melalui lembaga Qismul Arqa⁵ yang akhirnya berkembang menjadi Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah juga melakukan upaya pembentukan kader di lingkungan Muhammadiyah. Kemudian pada tahun 1951 PP. Majelis Tabligh Muhammadiyah mendirikan Akademi Tabligh Muhammadiyah (ATM), yang diharapkan dapat ikut membantu terbentuknya mubaligh-mubaligh Muhammadiyah tingkat akademi, di samping pada tahun-tahun itu Muhammadiyah mulai berkembang di luar negeri, sehingga diperlukan mubaligh-mubaligh yang cakap untuk itu.⁶

⁴ Pada tahun 1960-an Muhammadiyah banyak ditinggalkan oleh para ulamanya. Khususnya di Yogyakarta, tercatat dengan telah meninggalnya, KH.Ahmad Badawi, KH.Muqaddas Syuhada, dan KH.Ahmad Hanan. Hasil wawancara dengan Wiharto, 28 Desember 2007.

⁵ Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta mula-mula didirikan oleh KHA Dahlan pada tahun 1920 dengan nama "Qismul Arqa", atau sering pula disebut "Hogere School", yang berarti sekolah menengah tinggi. Sebuah nama yang cukup mentereng untuk ukuran zaman itu. Pada waktu itu, tempat belajarnya cukuplah menempati ruang makan yang sekaligus menjadi dapur keluarga KHA Dahlan. Tahun 1921 nama tersebut diganti dengan "Kweekschool Islam", lalu berubah lagi menjadi "Kweekschool Muhammadiyah". Pelajarannya masih campuran putra-putri. Pada tahun 1927 diadakan pemisahan, dengan mendirikan "Kweekschool Istri". Akhirnya pada Kongres Muhammadiyah tahun 1930 di Yogyakarta kedua sekolah guru ini diganti namanya menjadi "Madrasah Mu'allimin-Mu'allimat". Sebelum itu, yaitu pada tahun 1928 Kongres/Muktamar di Medan mengamanatkan kepada PP. Muhammadiyah untuk mengelola secara resmi Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta ini sebagai tempat pendidikan calon pemimpin, guru agama, dan mubaligh Muhammadiyah.

⁶ ATM (Akademi Tabligh Muhammadiyah) didirikan oleh tokoh-tokoh besar seperti KH. Kahar Muzakir dan Prof. Farid Ma'ruf. ATM setaraf dengan akademi. Orientasi pendidikan ATM adalah membentuk atau mencetak mubaligh; setelah selesai pendidikan dikirim ke daerah-daerah dalam jangka waktu 2-3 tahun lebih. Di antara para peserta yang dikirim ke pelosok/daerah bahkan akhirnya ada yang tidak kembali ke Yogyakarta karena menikah dengan

Untuk membina tenaga ahli dalam bidang khusus, Majelis Tabligh PP. Muhammadiyah juga mendirikan Madrasah Muballighin.⁷

KH. Umar Affandi termasuk tokoh yang memiliki keinginan kuat untuk mendirikan lembaga pendidikan calon ulama. Pada tahun 1968, ketika ada rapat pengurus Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Kyai Haji Umar Afandi mengajukan usul kepada pengurus Majelis Tarjih PP agar Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan yang khusus mempersiapkan calon ulama Muhammadiyah yang mumpuni dalam penguasaan kitab berbahasa Arab. Tetapi pada saat itu PP. Muhammadiyah kurang serius dalam menanggapi usulan tersebut. PP Muhammadiyah berpandangan lebih baik memaksimalkan peran Mu'allimin Muhammadiyah dari pada membentuk lembaga baru.⁸

Memang, sebagaimana dalam buku selang pandang Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, lembaga pendidikan Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah yang telah berdiri sejak tahun 1920, memiliki tujuan untuk: (1) mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah; (2) membentuk calon kader Persyarikatan Muhammadiyah; dan (3) Meyiapkan calon pendidik, ulama dan zuamma yang berkemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan.⁹

Meski gagasannya tidak mendapat respon yang positif, Kyai Umar Afandi tetap berkeinginan mendirikan lembaga baru, yang inputnya bukan tamatan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, tetapi tamatan sekolah menengah atas, atau bahkan yang sudah mahasiswa, sehingga proyeksi dari lembaga tersebut cenderung kepada model pendidikan tinggi di pesantren (Ma'had Aly). Gagasan untuk mendirikan lembaga baru untuk mendidik calon ulama ahli fiqh dari KH. Umar Afandi ternyata mendapat

warga setempat. Alumni ATM bisa mengambil kuliah lanjutan ke PTAIN. Meski secara resmi ATM didirikan oleh PP. Majelis Tabligh Muhammadiyah, tetapi pengelolaan ATM diserahkan kepada sebuah TIM. Ketika ATM dikelola oleh tokoh-tokoh yang lebih muda, ATM dirubah menjadi FIAD (Fakultas Ilmu Agama dan Dakwah). Tetapi pada tahun 1980-an ketika muncul UMY, FIAD agak tertatih, karena orang lebih banyak memilih ke PT yang lebih mapan. Akhirnya FIAD digabung ke UMY menjadi FAI (Fakultas Agama Islam). Hasil wawancara dengan Ustadz Suprpto Ibnu Juraimi, 10 Januari 2008

⁷ Madrasah Muballighin setaraf dengan Tsanawiyah dan Aliyah, dengan mata pelajaran dominant pada ilmu agama. Madrasah ini mirip dengan madrasah diniyah. Para siswa yang ikut dalam proses pembelajaran, sebagian besar adalah para pembantu di lingkungan suronatan, kauman Yogyakarta

⁸ Hasil wawancara dengan ustadz Syatibi, Maret 2007

⁹ Selang Pandang Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah

support dari Kyai Hadjid¹⁰ dan beberapa ulama terkemuka di lingkungan Muhammadiyah kala itu. Dukungan tersebut semakin menguatkan niat KH. Umar Afandi untuk merealisasikan gagasannya. Dalam upaya merealisasikan keinginannya, KH. Umar Afandi juga mengajak musyawarah dengan beberapa Kyai lain di lingkungan Muhammadiyah, terutama yang tinggal di daerah Kauman Yogyakarta, seperti: Kyai Baqir Sholeh, Kyai Hadjid, dan Kyai Wardan, untuk menentukan dasar, arah atau tujuan serta materi-materi yang perlu diajarkan beserta kemungkinan para kyai yang bisa memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang-bidang tersebut. Atas bantuan para ulama atau kyai tersebut akhirnya tersusun rancangan materi (kurikulum) yang akan digunakan dalam pembelajaran bagi para santri di PUTM.

Sambil menunggu respon dari PP. Majelis Tarjih, pada tahun 1968, Kyai Umar Afandi membuka lembaga Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Suprpto Ibnu Juraimi, yang kebetulan aktivis PII, mencoba menghubungi beberapa teman di lingkungan Muhammadiyah yang berminat. Ia kebetulan sudah cukup kenal dengan Kyai Umar Afandi, dan sangat respon dengan gagasannya untuk mendirikan lembaga pendidikan ulama calon ahli fiqh.

Atas upaya yang dilakukan oleh Suprpto Ibnu Juraimi, pada saat itu terkumpul dua belas orang calon tholabah. Dua belas orang itulah yang kemudian menjadi tholabah PUTM angkatan pertama. Oleh Kyai Umar Afandi kedua belas tholabah diminta untuk mengucapkan “baiat pendidikan”. Inti dari “baiat pendidikan”, menuntut para tholabah untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu di PUTM, dan ketika tholabah menghadapi dua pilihan antara PUTM dengan yang lain maka tholabah harus memilih salah satu, tidak boleh memilih keduanya”.¹¹

Sebagaimana dikatakan ustadz Syatibi, bahwa niat yang mendasari para santri (thalabah) mengikuti pendidikan di PUTM adalah semata karena ada keinginan yang kuat untuk bisa membaca kitab. Oleh karenanya, beberapa thalabah rela meninggalkan bangku kuliah hanya untuk mengikuti pendidikan di PUTM yang memang mensyaratkan tidak boleh merangkap status, kuliah di luar dan menjadi santri PUTM. Mereka sama sekali tidak mengharapkan akan mendapatkan ijazah sebagai bekal untuk melamar pekerjaan.

Menurut beliau, orientasi pendidikan di PUTM juga tidak pada kuantitas tetapi lebih kepada kualitas. Oleh karena itu seleksi berdasar kemampuan selama proses pendidikan sangat ketat. Hanya santri yang

¹⁰ Hasil wawancara dengan Wiharto, alumni PUTM tahun 2002, Desember 2007

¹¹ Hasil wawancara dengan KHMS. Ibnu Juraimi, 10 Januari 2008.

memiliki kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik secara berimbang yang mampu mengikuti pendidikan di PUTM sampai tuntas. Hal ini nampaknya didasarkan pada satu pemahaman bahwa ulama adalah manusia ideal yang di samping memiliki kemampuan keilmuan, ia juga memiliki sikap dan sifat yang bisa dijadikan sebagai suritauladan, serta mampu menjalankan apa-apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah.¹²

Pada angkatan pertama ini semua thalabah adalah lulusan jenjang pendidikan di sekolah menengah atas, pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, bahkan ada yang sudah menyandang gelar sarjana muda. Ini sekaligus membuktikan, bahwa PUTM memang diproyeksikan berbeda dengan Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, yang inputnya adalah alumni Madrasah Tsanawiyah atau Madrasah Ibtidaiyah.¹³

Pada enam bulan pertama dari masa pendidikan di PUTM, para tholabah harus membiayai sendiri biaya pendidikannya, terutama untuk biaya hidup sehari-hari. Oleh karena itu pada enam bulan pertama para tholabah memasak sendiri untuk keperluan makannya. Untuk kegiatan pendidikan dan tempat tinggal tidak dipungut biaya. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di Masjid at-Taqwa Muhammadiyah Suranatan, sedangkan sebagai asrama atau pondokan para tholabah (santri) adalah ruang atau kamar yang ada di samping utara masjid at-Taqwa Muhammadiyah Suranatan.¹⁴

Perjalanan PUTM pada enam bulan pertama yang seolah tidak mendapat respon positif dari PP. Muhammadiyah, juga diakui oleh ustadz Syatibi, sebagai berikut:

“PP Muhammadiyah hanya memberi restu saja. Apalagi pada saat itu PP Muhammadiyah kurang begitu setuju dengan pendirian lembaga baru sebagai tempat pendidikan calon ulama, disebabkan sudah ada Mu'allimin Muhammadiyah, yang arah pendidikannya juga pada pembentukan kader dakwah. Oleh karena itu, maka dalam mengelola PUTM Kyai Umar Afandi boleh dikata berjalan sendiri tanpa ada bantuan secara langsung dari Pengurus PP Muhammadiyah”¹⁵

Setelah melalui masa enam bulan pertama, pendidikan di PUTM dijadikan sebagai proyek dari PP. Muhammadiyah bagian Tarjih. Dengan status sebagai proyek PP Muhammadiyah, maka segala biaya hidup santri

¹² Hasil wawancara dengan ustadz Syatibi, alumni PUTM angkatan pertama, 12 Februari 2007

¹³ Ibid.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ustadz Suprpto Ibnu Juraim, 10 Januari 2008.

¹⁵ Hasil wawancara dengan ustadz Syatibi, pengajar PUTM, 12 Februari 2007

ditanggung oleh PP. Muhammadiyah. Para santri PUTM tidak lagi harus bersusah payah memasak untuk keperluan makan, karena mereka sudah mendapatkan catering makanan dari salah seorang dermawan yang sangat menaruh perhatian terhadap masa depan ulama di lingkungan Muhammadiyah.¹⁶

Ketertarikan PP. Muhammadiyah untuk menjadikan PUTM sebagai bagian dari proyeknya, mungkin juga dipengaruhi oleh kemampuan dan keseriusan KH. Umar Afandi dalam mendidik para thalabah selama enam bulan pertama. Sebagaimana diceritakan ustadz Ibnu Juraimi, bahwa dalam menangani para tholabah terutama pada fase-fase awal dengan penekanan pada penguasaan qawa'id, Kyai Umar Afandi sendiri yang menangani. Terkait dengan pembelajaran qawa'id, Kyai Umar Afandi nampaknya memiliki metode sendiri yang berbeda dengan metode pembelajaran ilmu alat sebagaimana yang bisaanya diajarkan di berbagai pesantren tradisional. Memang, metode yang digunakan sebenarnya hampir sama dengan yang di pesantren tradisional, model sorogan, tetapi ada sisi lain yang dimunculkan oleh Kyai Umar Afandi. Jika pada pesantren tradisional jurumiyah baru bisa dikhatamkan setelah melalui masa belajar selama satu tahun, tetapi di PUTM bisa diselesaikan dalam waktu dua minggu, dengan hasil yang sangat memuaskan. Hal ini terbukti ketika dilakukan ujian pertama kali terhadap penguasaan jurumiyah yang dilakukan oleh para kyai di lingkungan Muhammadiyah saat itu.

Kyai Baqir Sholeh, yang di lingkungan ulama Muhammadiyah dikenal sebagai ahli bahasa, juga merasa heran ketika mengetahui kemampuan tholabah PUTM yang dalam menguasai bahasa Arab bisa sedemikian cepat. Rasa penasaran ini mendorong beliau untuk mengikuti dan mengamati cara mengajarnya Kyai Umar Afandi. Setelah selesai mengikuti dan mengamati selama satu sesi, beliau berkomentar, "wah kalau cara mengajarnya seperti itu, wajar kalau para tholabah bisa cepat menguasai bahasa Arab, meski saya sendiri tidak sanggup".¹⁷

Setelah para santri menguasai dasar-dasar bahasa Arab (qawa'id), kemudian memasuki pemahaman kitab, Kyai Umar Afandi mulai memanfaatkan keilmuan dari Kyai Hadjid (ahli tafsir), Kyai Wardan Diponegoro, Kyai Aslam Zainuddin, Kyai Bakir Sholeh¹⁸, dan lain sebagainya.¹⁹

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Hasil wawancara dengan ustadz Suprpto Ibnu Juraimi, 10 Januari 2008.

¹⁸ Menurut KHMS. Ibnu Juraimi, Kyai Umar Afandi, Kyai Hadjid, dan Kyai Baqir Sholeh adalah ibarat tiga serangkai yang menjadi tulang punggung PUTM saat itu. Di jajaran pengurus PP Majelis Tarjih, Kyai Baqir Sholeh bahkan merupakan kyai andalan, yang senantiasa mewakili Muhammadiyah dalam setiap diskusi atau perdebatan soal permasalahan agama. Bahkan jika Kyai A. Hasan dari

Program pendidikan PUTM yang demikian ketat dan antusiasme yang sangat tinggi dari Kyai Haji Umar Afandi, di satu sisi menjadikan proses penguasaan tholabah terhadap qawa'id dan kitab menjadi lebih cepat. Namun di sisi lain, tidak semua tholabah mampu bertahan untuk menyelesaikan program pendidikan di PUTM. Maka dari kedua belas tholabah angkatan pertama PUTM, hanya ada lima yang dinyatakan lulus mengikuti pendidikan di PUTM.²⁰

Melihat kenyataan demikian, maka PP. Muhammadiyah merasa kurang puas. Dalam pandangan PP. Muhammadiyah proyek yang cukup bergengsi mestinya bisa melahirkan banyak ulama, bukan hanya sekedar lima saja. Berbeda halnya dengan Kyai Umar Afandi. Beliau tidak mempersoalkan berapa jumlah tholabah yang harus lulus dari pendidikan di PUTM. Sebab untuk menjadi ulama dibutuhkan seleksi yang ketat, termasuk ketika dalam proses pendidikan, sehingga kelak ketika sudah terjun di dalam masyarakat benar-benar memiliki landasan keilmuan yang matang. Ketidakpuasan PP. Muhammadiyah terhadap hasil yang ditunjukkan secara kuantitas oleh Kyai Umar Afandi melalui PUTM,

Persis mengajak diskusi soal agama, maka Kyai Baqir Sholehlah yang tampil untuk menghadapi argumentasi dari KHA. Hasan. Hasil wawancara dengan Ustadz Ibnu Juraimi, 10 Januari 2008.

¹⁹ Kyai Aslam Zainuddin (mengajar Risalah Tauhid); Kyai Wardan Diponegoro (mengajar adab dan ilmu mantiq); Kyai Jamhari (mengajar Subulus Salam); KH. Baqir Sholeh (mengajar bahasa Arab); Kyai Hadjid (mengajar tafsir). KH. Umar Afandi lebih banyak memegang kitab kuning yang terkait dengan ilmu alat, seperti nahwu dan shorof, di samping juga mengajar tafsir. Beberapa materi tambahan yang tidak terkait dengan kitab kuning juga diberikan. Materi-materi tambahan tersebut di antaranya adalah bahasa Indonesia (ustadz Asdi Saridan), bahasa Inggris, Ilmu Falak (ustadz Bidrun), Akhlak (Kyai Dalhar), dan Kemuhammadiyahan (ustadz Haiban Hadjid). Hasil wawancara dengan ustadz Syatibi dan ustadz Hamdan Hambali, pada tanggal 12 dan 15 Februari 2007.

²⁰ Mereka itu adalah Suprpto Ibnu Juraim, Syatibi, Ilyas Yunus, Muhammad Ali, dan Abdullah Said. Setelah mengajar selama dua tahun di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, Suprpto Ibnu Juraim ditugaskan oleh PP. Muhammadiyah ke Palu, Sulawesi Tengah, untuk mendirikan pondok pesantren Muhammadiyah di tempat tersebut. Abdullah Said ditugaskan oleh PP. Muhammadiyah di wilayah Kalimantan Tengah untuk menjadi tenaga da'I, tetapi kemudian beliau justru berhasil mendirikan pondok pesantren Hidayatullah yang sampai sekarang gaungnya cukup dikenal diberbagai pelosok Indonesia. Syatibi yang kebetulan diambil menantu oleh KH. Umar Afandi membantu kegiatan pendidikan di PUTM untuk angkatan II, tetapi kemudian menjadi PNS (Hakim Agama) di Sampang, Madura. Muhammad Ali ditugaskan oleh PP. Muhammadiyah untuk melakukan dakwah di Suriname. Hasil wawancara dengan ustadz Suprpto Ibnu Juraim, ustadz Syatibi, 12 Februari 2007 dan 10 Januari 2008.

berakibat pada proses pembiayaan PUTM pada angkatan berikutnya, karena PP. Muhammadiyah tidak lagi menjadikan PUTM sebagai proyek.²¹

Meski dari sisi finansial tidak lagi mendapat support dari PP. Muhammadiyah, Kyai Umar Afandi tetap antusias untuk membuka angkatan II PUTM. Biaya pendidikan, di samping di topang sendiri, juga diupayakan dari beberapa dermawan yang masih bersedia memberikan bantuan finansial. Pada saat itu yang aktif mencari dana operasional pendidikan dan biaya hidup bagi tholabah adalah Kyai Haji Umar Afandi dan Kyai Baqir. Mereka berdua banyak melakukan komunikasi dengan para pengusaha batik yang ada di sekitar Yogyakarta untuk mendapatkan bantuan dana operasional.²²

Pada angkatan ini, beberapa kyai yang selama ini membantu proses pendidikan di PUTM juga tetap memberikan dukungan secara akademik. Tetapi dengan kurikulum yang sangat padat dan model pembelajaran yang menuntut keseriusan ekstra dari para tholabah, satu demi satu tholabah yang ada juga berguguran. Sebenarnya ada satu tholabah yang mampu bertahan, tetapi karena ia diketahui merangkap kuliah di Fakultas Ilmu Agama dan Dakwah (FIAD), maka iapun diminta memilih salah satu, PUTM atau FIAD. Ketika tholabah tersebut memilih FIAD, maka pada saat itu juga Kyai Umar Afandi menganggap tholabah tersebut sudah tidak layak untuk meneruskan pendidikan di PUTM. Maka praktis, pada angkatan II PUTM, tidak ada satupun tholabah yang dinyatakan lulus dari PUTM.²³

Setelah angkatan kedua PUTM tidak ada satupun tholabah yang bisa mengikuti pendidikan sampai selesai, Kyai Umar Afandi kembali membuka penerimaan tholabah PUTM angkatan ketiga. Pada angkatan ketiga PUTM, jumlah tholabah PUTM ada empat orang. Tetapi seperti angkatan-angkatan sebelumnya, dari empat tholabah, yang mampu bertahan sampai selesai hanya satu orang, yaitu Hamdan Hambali.²⁴ Pada angkatan ketiga PUTM, beberapa kyai di Kauman juga masih terlibat dalam kegiatan pembelajaran, seperti: Kyai Aslam Zainuddin (mengajar Risalah Tauhid); Kyai Wardan Diponegoro (mengajar adab dan ilmu mantiq); Kyai Jamhari (mengajar Subulus Salam); dan KH. Baqir Sholeh

²¹ Hasil wawancara dengan Ustadz Suprpto Ibnu Juraim, tanggal 10 Januari 2008.

²² Hasil wawancara dengan Ustadz Syatibi, Maret 2008.

²³ Hasil wawancara dengan Ustadz Ibnu Juraim, tanggal 10 Januari 2008.

²⁴ Hasil wawancara dengan Ustadz Hamdan Hambali, alumni PUTM angkatan ketiga, tanggal 19 Maret 2007.

(mengajar bahasa Arab).²⁵ Angkatan ketiga PUTM berakhir pada tahun 1976.

Setelah angkatan ketiga, Kyai Umar Afandi semakin sibuk dengan urusan keluarga, terutama setelah beliau ditinggal wafat istri pertamanya, Mu'siyah. Sebagaimana diceritakan ustadz Ibnu Juraim, bahwa setelah istri pertama meninggal, Kyai Umar Afandi menikah lagi, dan bersama istri yang kedua beliau tinggal di daerah Condongcatur, yang relatif jauh dari Surosutan. Kepergian Kyai Umar Afandi dari Surosutan menyebabkan vakumnya PUTM, yang selama perjalannya memang tidak memiliki struktur kepengurusan yang terorganisir serta regenerasi yang disiapkan secara matang. Maka sejak tahun 1977 tidak ada lagi PUTM sampai kemudian dihidupkan kembali oleh Pengurus Wilayah Muhammadiyah DIY pada akhir tahun 1989.²⁶

2. PP. PUTM PDM DIY (Sekitar Tahun 1990-2005)

Vakumnya PUTM berarti mandegnya salah satu media kaderisasi di lingkungan Muhammadiyah, terutama yang secara khusus mempersiapkan kader ulama ahli fiqh.²⁷ Di sisi lain, meninggalnya beberapa ulama besar di lingkungan Muhammadiyah, meski semua itu sudah merupakan suratan Ilahi, tetapi sempat pula menimbulkan

²⁵ Ibid.

²⁶ Hasil wawancara dengan Ustadz Suprpto Ibnu Juraim, tanggal 10 januari 2008.

²⁷ Kader Muhammadiyah dapat dikelompokkan dalam: (1) Kader Persyarikatan. Kader ini harus memiliki wawasan yang luas meskipun tidak mendalam. Kader Persyarikatan ini harus memiliki wawasan keislaman dan dakwah yang cukup luas. Kader ini juga harus memahami masalah-masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, hukum, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain-lain. Oleh karena sebagai kader Persyarikatan, mereka harus dapat memahami hubungan antara Islam dan masalah-masalah kemasyarakatan; (2) kader untuk pimpinan Persyarikatan, juga diperlukan kader profesi muballigh (Majlis Tabligh), kader ulama (Majlis Tarjih), kader pendidik (Majlis Pendidikan), kader ekonomi dan kader wiraswastawan (Majlis Ekonomi), kader pekerja sosial, kader untuk menggarap perpustakaan (Majlis Pustaka) dan sebagainya. Mereka ini harus memahami secara lebih mendalam yang menjadi profesinya; (3) kader pimpinan amal usaha untuk memimpin amal usaha. Amal usaha harus dipimpin oleh orang-orang yang mengerti Muhammadiyah dan memiliki ketrampilan manajemen. Selama ini kader kepemimpinan amal usaha sering diserahkan kepada kader yang ditemukan 'di tengah jalan'. Akibatnya karena tidak faham bagaimana harus bekerja di Muhammadiyah, maka sering terjadi kekisruhan. Muhammadiyah sering dianggap sebagai suatu perusahaan, sehingga pimpinan tersebut sering menuntut fasilitas yang bermacam-macam, yang tidak bisaa terjadi di Muhammadiyah

keresahan di kalangan Muhammadiyah.²⁸ Apalagi ketika fakta tentang meninggalnya beberapa ulama tersebut dikaitkan dengan isu semakin langka dan keringnya ulama di lingkungan organisasi Islam besar semacam Muhammadiyah. Para aktivis Muhammadiyah pun termotivasi untuk mengangkat isu kaderisasi dalam forum muktamar.

Maka pada muktamar Muhammadiyah ke 41 tanggal 7-11 Desember 1985 di Surakarta, setelah mempertimbangkan usul dan saran dari peserta muktamar, PP. Muhammadiyah dalam salah satu keputusannya yang termaktub dalam bidang program pendidikan dan kebudayaan poin peningkatan pendidikan, dalam salah satu diktumnya (diktum m) mengintruksikan kepada semua jajaran pimpinan Muhammadiyah di tingkat daerah untuk menyelenggarakan pondok pesantren Muhammadiyah sebagai wadah pengkaderan anak-anak Muhammadiyah.²⁹ Peserta muktamar di Surakarta juga mengusulkan kepada Majelis Tabligh, terkait dengan perlunya meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para mubaligh yang sudah ada dan perlunya ada upaya untuk menjadikan calon muballigh (kader muballigh).³⁰

Dalam Berita Resmi Muhammadiyah Nomor: 100 tahun 1985, juga dimuat informasi penerimaan santri baru bagi Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran Surakarta, sebuah lembaga Pendidikan Kader Persyarikatan Tingkat Akademi yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta.³¹

²⁸ Beberapa ulama kenamaan di kalangan Muhammadiyah (di Yogyakarta) yang meninggal dunia, di antaranya Kyai R. Mohammad Wardan Diponegoro, Kyai Juweini, Kyai R.H. Hadjid, KH. Bakir Soleh, KH. Johar, KH. Muslim, KH. Dalhar BKN, KH. Basyir, KH. Juwaini, dan KH. Aslam Zainuddin. Hasil wawancara dengan Wiharto, 28 Desember 2008.

²⁹ PP. Muhammadiyah, Berita resmi Muhammadiyah Edisi Khusus "Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 41 di Surakarta tanggal 7-11 Desember 1985 Masehi/24-28 Rabi'ul Awal 1406 Hijriah", hlm. 19

³⁰ Ibid.

³¹ Status mahasiswa adalah juga mahasiswa UMS Fakultas Ilmu-ilmu Agama Islam (Ushuluddin atau Syariah) Calon dikirim oleh PWM (tiap wilayah 2 orang) satu untuk ushuluddin, satu untuk syariah, yang telah dinyatakan lulus pada testing saringan. Pembiayaan: (1) pihak UMS, menyediakan asrama dan ruang kuliah; membebaskan uang kuliah, dana pengembangan dan uang ujian semester/ujian lokal; (2) pihak PWM: membayar uang makan ke UMS lewat pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran; memberi uang keperluan sehari-hari; menyediakan biaya ujian Negara untuk tingkat sarjana muda. Di antara syarat yang harus dipenuhi adalah kesediaan santri untuk ditugaskan oleh Pimpinan Wilayah dan PP Muhammadiyah di tempat yang ditentukan; dan selama pendidikan tidak boleh menikah. Lihat, PP. Muhammadiyah, Berita Resmi Muhammadiyah Nomor: 100 tahun 1985, hlm. 3-4.

Meski secara spesifik, Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 41 di Surakarta pada tahun 1985 tidak menyebut PUTM, melainkan lebih umum yaitu pondok pesantren Muhammadiyah, tetapi diktum tersebut ternyata mampu mengingatkan kembali jajaran pengurus Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta akan PUTM yang dulu pernah dirintis oleh Kyai Umar Afandi dan mengalami kevakuman setelah ditinggalkan oleh beliau.

Pada waktu Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar musyawarah wilayah tahun 1987, rekomendasi muktamar mendapat follow up dalam bentuk keputusan untuk menghidupkan kembali PUTM sebagai bagian dari proyek PWM Daerah Istimewa Yogyakarta. Apalagi ketika itu Pengurus Wilayah Muhammadiyah DIY melihat Suprpto Ibnu Juraim, salah satu alumni PUTM angkatan I proyek PP Muhammadiyah sudah kembali ke Yogyakarta, setelah selama tujuh tahun menunaikan tugas dari PP. Muhammadiyah di Palu Sulawesi Tengah untuk mendirikan Pondok Pesantren Muhammadiyah. Ketua PWM DIY, Muhammad Muqaddas dan beberapa pengurus PWM lain, yang sedikit banyak sudah mengenal Suprpto Ibnu Juraim, segera menunjuknya sebagai orang yang dianggap mampu menangani PUTM. Apalagi pada saat itu tugas dari PP. Muhammadiyah yang diamanatkan kepada Suprpto Ibnu Juraim untuk menjadi Direktur Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta (1980-1986) telah usai, sehingga Suprpto Ibnu Juraim dianggap memiliki waktu luang untuk menangani PUTM. Pada saat menjadi Direktur Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, Suprpto Ibnu Juraim juga pernah membuka kelas khusus yang diperuntukkan bagi alumni Mu'alimin dengan pola/model pembelajaran yang hampir sama dengan PUTM. Sehingga pemberian amanat kepada Suprpto Ibnu Juraim untuk menghidupkan kembali PUTM yang selama ini mengalami kevakuman, karena ditinggal Kyai Umar Afandi, adalah sangat tepat.

Setelah dilakukan persiapan secara matang, maka pada tahun 1989, PUTM secara resmi dibuka kembali dan dijadikan sebagai bagian dari proyek PWM DIY, dengan direktur Ustadz Suprpto Ibnu Juraim. Pendirian atau pembukaan kembali PUTM ini sebenarnya didasarkan pada dua konsep, yaitu konsep pendidikan dan konsep keulamaan. *Pertama*, Konsep Pendidikan. Proses pendidikan pada PUTM didasarkan atas pengertian bahwa pendidikan itu adalah suatu upaya sadar berupa kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan untuk mempersiapkan peserta didik bagi perannya di masa depan dan aktualisasi dirinya sebagai manusia ciptaan Allah SWT.

Kedua, Konsep Keulamaan. Pendidikan pada PUTM didasarkan pada pengertian tentang ulama sebagai orang yang sekurang-kurangnya

memiliki: (a) Memahami dan mendalami al-Qur'an dan tafsirnya serta al-Hadits dan syarahnya, (b) Memiliki kefaqihan dalam *ulumusy syar'iyah* dan *ulumul kawuniyah*, (c) Penguasaan yang memadai terhadap ilmu-ilmu alat : Bahasa Arab dengan semua cabangnya, Ushul Fiqh, Uloomul-Hadits, Uloomul Qur'an, dan *Manahiju istinbathil hukmi* , (d) Berakhlakul karimah, tekun serta khusyu' dalam beribadah, (e) Memiliki ketrampilan dalam berorganisasi, berdakwah dan berwirausaha, (f) Memiliki kearifan yang merupakan perpaduan antara ilmu dan kesalehan di satu pihak dan *insight* (wawasan mendalam) dalam melihat dunia kehidupan dan kebenaran di pihak lain.³²

Sedangkan tujuan pendidikan pada PUTM adalah mempersiapkan kader ulama Muhammadiyah sebagai motor penggerak perjuangan persyarikatan ke arah tercapainya masyarakat utama yang dicita-citakan.³³

Pada tanggal 10 Oktober 1989, di buka perkuliahan perdana PUTM angkatan I untuk masa studi tiga tahun (enam semester). Penerimaan santri atau tholabah PUTM angkatan I proyek PWM DIY segera dilakukan dengan cara "gethok tular" secara lisan dari satu aktivis ke aktivis yang lain di lingkungan Muhammadiyah. Meski demikian, banyak juga yang berminat menjadi santri/thalabah PUTM. Ada 14 santri atau tholabah yang menjadi peserta pendidikan di PUTM D.I. Yogyakarta. Mereka adalah sarjana muda atau mahasiswa semester VI, dari beberapa perguruan tinggi di D.I. Yogyakarta. Di antara para peminat bahkan ada yang sudah sarjana IAIN dan ada yang hampir selesai perguruan tinggi.³⁴

Pada angkatan I PUTM proyek PWM, Kyai Umar Afandi juga direkrut untuk mengajar. Dari keseluruhan thalabah, di bagi menjadi dua kelompok, sebagian belajar dengan ustadz Suprpto Ibnu Juraim, dan sebagian yang lain, yang kemampuannya lebih bagus belajar dengan Kyai Umar Afandi. Angkatan I PUTM proyek PWM berjalan dari tahun 1989 sampai tahun 1993. Dari 14 santri atau thalabah yang mengikuti pendidikan di PUTM yang berhasil sampai selesai ada 11 thalabah.

Berbeda dengan thalabah PUTM pada saat Kyai Umar Afandi menjadi mudir, pada angkatan I PUTM proyek PWM, karena sejak awal masuk para thalabah sudah dibiayai oleh Muhammadiyah, maka setelah menyelesaikan pendidikan di PUTM, para thalabah diwajibkan melaksanakan pengabdian selama dua tahun di lingkungan amal usaha Muhammadiyah. Beberapa tempat yang digunakan sebagai tempat pengabdian, antara lain adalah: (1) di PP Darul Uloom di daerah Galur

³² Dikutip dari Dokumen Pengembangan PUTM, pada tanggal 6 April 2006

³³ Ibid.

³⁴ Hasil wawancara dengan ustadz Suprpto Ibnu Juraim, 10 Januari 2008.

dekat Pantai Selatan Kulonprogo; (2) di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta.³⁵

Tahun 1994 di buka penerimaan thalabah baru angkatan II. Pada penerimaan thalabah PUTM angkatan II proyek PWM, ada sekitar 83 calon thalabah yang berminat, yang seluruhnya berasal dari Jawa. Tetapi dari keseluruhan peminat, yang diterima hanya 25 tholabah. Jika pada angkatan I PUTM proyek PWM peserta berasal dari sarjana muda, pada angkatan kedua ini, di ambilkan dari lulusan Madrasah Aliyah atau yang sederajat. Masa studi diubah dari tiga tahun menjadi empat tahun (delapan semester) dengan harapan mutu yang dihasilkan akan semakin baik.

Pada angkatan kedua, pola penerimaan tholabah baru semakin diperketat, namun demikian tetap mengacu pada pola penerimaan santri atau siswa pada lembaga pendidikan lain, yakni terlebih dahulu peserta melengkapi persyaratan administrasi berupa ijazah terakhir dan surat rekomendasi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah asal calon tholabah. Selanjutnya mengikuti tes ujian seleksi, baik lisan ataupun tertulis. Pada ujian lisan, calon tholabah diminta untuk membacakan suatu paragraf kitab yang dijadikan bahan tes, berbahasa arab tanpa syakal yang ditunjukkan oleh penguji. Calon tholabah diminta menjelaskan arti dan pengertian secara umum dari kitab tersebut, dan beberapa pertanyaan sekitar *qawaid lughowiyah al-arabiyah* dan al-Islam serta kemuhammadiyah. Dari jawaban peserta tes itulah penguji dapat menilai dan mengetahui kemampuan dasar agama serta fikrah yang dimiliki oleh setiap calon tholabah, selanjutnya dijadikan catatan penguji untuk menerima atau tidak peserta ujian tersebut. Tes selanjutnya baca tulis al Qur'an, untuk diketahui kemampuan tilawah serta tajwid dari setiap peserta ujian.

³⁵ Tempat yang digunakan sebagai pengabdian dari setiap angkatan semakin meluas lingkupnya, tidak hanya di propinsi DI.Yogyakarta, melainkan meluas ke Jawa Tengah, atau bahkan ke luar Jawa. Tempat-tempat tersebut adalah: (1) Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta; (2) Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta; (3) Ma'had Muhammadiyah Kudus Jawa Tengah; (4) Madrasah/Pondok Pesantren Darul Ulum Kulonprogo; (5) RSU PKU Sruweng Kebumen Jawa Tengah; (6) Majelis Tabligh dan Da'wah Khusus Muhammadiyah DIY; (7) Pondok Pesantren Muhammadiyah di Metro, Lampung; (8) PDM Majalengka Jawa Barat; (9) Pondok Pesantren Fauzul Muslimin Yogyakarta, (10) Pondok Pesantren Al Manar Kulonprogo DIY; (11) PDM Garut Jawa Barat; (12) Pondok Pesantren Muhammadiyah Srandakan Bantul DIY; dan sebagainya. Hasil wawancara dengan Budi, alumni PUTM 2006 yang sedang menjalani pengabdian wajib di PUTM, Maret 2007.

Tahapan berikutnya tes tertulis, berupa soal al Islam, meliputi aqidah, akhlaq, ibadah-muamalah dan Kemuhammadiyah. Selanjutnya peserta ujian menunggu pengumuman. Bagi yang dinyatakan diterima selanjutnya masuk asrama dan siap di baiat. Baiat yang dimaksudkan disini, berupa mengucapkan janji prasetia untuk mematuhi peraturan dan tata tertib selama menjalani pendidikan. Angkatan kedua berakhir tahun 1998, dari 25 tholabah, hanya 14 yang selesai dan di wisuda.^{as}

Setelah angkatan II PUTM proyek PWM selesai, kemudian dibuka angkatan III (periode 1998-2002). Pada angkatan III PUTM proyek PWM, mudir PUTM dipegang oleh ustadz Ghozali Mukri. Pergantian mudir ini bukan karena ustadz Suprpto Ibnu Juraim mengundurkan diri, tetapi karena sudah dua periode memegang PUTM. Tradisi di Muhammadiyah, memegang jabatan tidak boleh lebih dari dua periode. Pada angkatan III ini, kegiatan Pendidikan yang semula dilaksanakan di masjid Taqwa Muhammadiyah di Suronatan, dialihkan di kompleks Pondok Pesantren PUTM, Gedongkiwo MJ I/ 735 B Mantrijeron Yogyakarta, menempati bangunan gedung Sekolah Dasar Muhammadiyah yang sebelumnya telah direnovasi dengan penambahan beberapa bangunan.

Penerimaan santri pada angkatan ketiga dilakukan dengan mengirim selebaran ke seluruh PWM yang ada di Indonesia, agar mereka mengirimkan calon santri yang telah diseleksi oleh PWM setempat. Setiap PWM hanya diperkenankan mengirimkan utusan sebanyak dua orang calon santri untuk diseleksi kemampuannya sebagai syarat kelayakan mengikuti pendidikan di PUTM.

Pada angkatan ini orientasi PUTM sudah mulai mengarah kepada perguruan tinggi. Setidaknya PUTM sudah mulai diupayakan agar bisa dihubungkan dengan perguruan tinggi yang ada di lingkungan Muhammadiyah, baik Universitas Ahmad Dahlan (UAD) maupun Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) terutama pada Fakultas Agama. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar alumni PUTM bisa memperoleh ijazah yang diakui pemerintah, sehingga mereka bisa melamar/memperoleh pekerjaan yang layak dengan bekal ilmu yang setara dengan program sarjana (S-1). Dari 30 santri yang diterima pada awal tahun pelajaran, setelah mengikuti proses pendidikan hanya ada 20 thalabah yang lulus.

Pada angkatan IV PUTM proyek PWM (periode 2002-2006), ustadz Suprpto Ibnu Juraim kembali ditarik untuk memegang jabatan mudir PUTM. Penggantian kembali dari ustadz Ghozali Mukri kepada ustadz Suprpto Ibnu Juraim nampaknya lebih banyak terkait dengan kesanggupan untuk meluangkan waktu yang lebih banyak untuk mendampingi kehidupan thalabah dalam keseharian. Sebab sebagaimana diceritakan ustadz Suprpto Ibnu Juraim, selama mudir dipegang ustadz

Ghozali Mukri, beliau tidak bisa mendampingi para thalabah di pesantren. Dampaknya, sisi kehidupan rohani para thalabah menjadi kurang terjamah secara optimal. Hal ini juga diakui Irfan Nurudin, yang pada periode tersebut menjadi thalabah.³⁶

3. PP. PUTM PP. Muhammadiyah (Tahun 2005-sekarang)

Pada tahun 2003 terjadi perkembangan yang positif di jajaran PP. Muhammadiyah terkait dengan PUTM. Hal tersebut ditunjukkan dengan keluarnya Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 58/Kep/I.0/B/2003, tentang Tanfidz Tanwir Muhammadiyah Tahun 1424 H/2003 M di Makassar, yang salah satu keputusan dalam bidang pendidikan (bidang manajemen) telah menyinggung pentingnya memformulasikan model pendidikan khusus yang dapat menghasilkan kader ulama tabligh dan tarjih Muhammadiyah serta kader ulama perempuan.³⁷

Sidang Tanwir juga merekomendasikan kepada Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah untuk memperhatikan secara sungguh-sungguh penyelenggaraan pendidikan ulama tarjih secara regular.³⁸ Rekomendasi sidang Tanwir tahun 2003, kembali dikuatkan oleh Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-45 di Malang, dalam salah satu program nasional bidang kaderisasi (poin h) disebutkan bahwa PP. Muhammadiyah akan “membina dan mengawasi secara intensif pelaksanaan sekolah kader proyek PP. Muhammadiyah seperti Madrasah Mu’allimin-Mu’allimat Muhammadiyah, PP Darul Arqam Muhammadiyah, Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran, dan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM)”.³⁹

Terkait dengan PUTM, pada tahun 2005, PP. Muhammadiyah kembali mengambil alih PUTM sebagai bagian dari proyeknya. Pengambilalihan PUTM dari proyek PWM menjadi proyek PP. Muhammadiyah dimulai pada saat penerimaan santri/thalabah PUTM

³⁶ Irfan mengatakan: “Ketika mudir dipegang ustadz Suprpto, beliau lebih menekankan shalat malam, akhlak. Maka alumninya, shalat malamnya kenceng, akhlaknya halus. Tetapi untuk pemikiran harus mengembangkan sendiri. Kemudian setelah pak Ghazali, beliau tidak tinggal di sini, sehingga shalat malam berjalan tetapi lebih personal, tidak jamaah. Mata kuliah juga lebih masuk nuansa pemikiran akademik kampus, bukan nuansa kepesantrenan” (Hasil wawancara dengan Irfan Nuruddin, alumni PUTM tahun 2002, tanggal 16 Juli 2006).

³⁷ PP. Muhammadiyah, Berita Resmi Muhammadiyah Nomor 04 / 2003 “Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 58/Kep/I.0/B/2003, tentang Tanfidz Tanwir Muhammadiyah Tahun 1424 H/2003 M di Makassar”, hlm. 26

³⁸ Ibid., hlm. 53

³⁹ PP. Muhammadiyah, Berita Resmi Muhammadiyah Nomor: 01/2005, Tanfidz Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-45 di Malang, hlm.

angkatan ke V (angkatan I Kaliurang). Penerimaan santri/thalabah PUTM angkatan V proyek PP. Muhammadiyah dilakukan satu tahun sebelum angkatan IV PUTM proyek PWM selesai masa pendidikannya. Penerimaan santri/thalabah baru yang berbeda dengan tradisi sebelumnya, disebabkan banyak muncul keluhan terkait dengan tidak adanya kesinambungan antar alumni PUTM dari setiap angkatan, karena antara angkatan sebelumnya dengan sesudahnya tidak pernah bertemu.⁴⁰

Upaya menjadikan PUTM sebagai proyek PP. Muhammadiyah, ternyata tidak mudah. Tidak sedikit dari para anggota PP. Muhammadiyah, terutama yang berdomisili di Jakarta, menentang upaya tersebut. Sidang Pleno PP. Muhammadiyah tahun 2003 merupakan momen yang cukup menentukan. Dasron Hamid adalah orang yang sangat gigih memperjuangkan keberadaan PUTM, ketika beberapa pengurus yang tinggal di Jakarta mempersoalkan keberadaan lembaga tersebut. Usulan Dasron Hamid mendapat dukungan dari Muhammad Muqaddas. Beliau di samping bersikukuh untuk mempertahankan keberadaan PUTM, juga mengusulkan agar PUTM menjadi bagian dari proyek PP Muhammadiyah. Sikap dan argumen Dasron Hamid dan Muhammad Muqaddas ternyata mendapat dukungan dari Asymuni Abdurrahman, sehingga sidang pleno akhirnya bisa menerima PUTM, dan menjadikannya sebagai bagian dari proyek PP. Muhammadiyah.⁴¹

Sebagai realisasi dari bentuk pembinaan dan pengawasan secara intensif atas pelaksanaan sekolah kader proyek PP. Muhammadiyah (khususnya PUTM) PP. Muhammadiyah segera mengeluarkan SK. PP. Muhammadiyah Nomor: 387/I.0/A/2006, tertanggal 1 Juli 2006, Tentang Penunjukan Pimpinan Badan Pelaksana Harian PUTM PP. Muhammadiyah. Personil BPH terdiri dari perwakilan dari unsur PP. Majelis Tarjih, PWM DIY, dan intelektual di lingkungan Muhammadiyah.⁴²

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Irfan Nuruddin, alumni PUTM tahun 2002, Juli 2006.

⁴¹ Untuk menangani proyek tersebut oleh PP. ditunjuk ustadz Suprpto Ibnu Juraim sebagai mudir, Drs. H. Zaini Munir, MA.. sebagai Wakil Mudir I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Drs. Hamdan Hambali sebagai Wakil Mudir II Bidang Umum dan Keuangan, Budi sebagai Pembantu Bidang Akademik, dan Fachrudin sebagai Pembantu Bidang Kerumah tanggaan/KRT (Hasil wawancara dengan ustadz Suprpto Ibnu Juraim, tanggal 10 Januari 2008)

⁴² Para personil yang ditunjuk sebagai BPH PUTM adalah: Drs. H. Fahmi Muqaddas, M.Hum. (ketua), Drs. H. Dahwan, M.Si. (sekretaris), beserta tujuh anggota lain, yaitu: Drs. H. Hadjam Murusydi, SU., Drs. HM. Anis, MA., H. Rosil Bakir, MBA, Ir. H. Dasron Hamid, M.Sc., H. Anang Rikza Masyhadi, Lc., Dr. H. Muh. Ihsan, dan Nasrullah, S.IP. (Dikutip dari Lampiran SK. PP. Muhammadiyah Nomor. 387/I.0/A/2006, tertanggal 1 Juli 2006, tentang Penunjukan Pimpinan

III. Kontinuitas dan Perubahan PP. PUTM Yogyakarta

Perjalanan PUTM dari satu angkatan ke angkatan berikutnya ternyata sering memunculkan pertanyaan dari para thalabah, terutama terkait dengan persoalan legalitas formal dari para alumninya. Banyak keluhan muncul dari para alumni terkait dengan bukti formal (ijazah) yang sering dipertanyakan oleh lembaga tempat para alumni mengabdikan ilmunya, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan yang nota bene adalah lembaga pendidikan Muhammadiyah.

Sejak awal mula berdiri, PUTM memang tidak memberikan ijazah kepada para alumninya, karena proyeksi PUTM bukan kepada bukti formal tetapi lebih kepada penguasaan keilmuan. Bukti formal (ijazah) hanya akan menjadikan alumni PUTM lebih cenderung untuk menjadi pegawai negeri yang hidupnya selalu bergantung kepada pemerintah dibanding menjadi ulama yang mandiri sehingga mampu bersuara lantang. Prinsip Kyai Umar Afandi ini tetap dipegang teguh oleh ustadz Suparpto Ibnu Juraim, sehingga setiap kali ada pertanyaan terkait dengan ijazah, beliau kurang begitu berkenan. Tawaran dari UAD dan UMY untuk memberikan gelar kepada alumni PUTM setelah mendapat beberapa tambahan mata kuliah di UAD atau UMY, juga selalu di tolak ustadz Ibnu Juraim. Kondisi demikian terus berlangsung hingga angkatan IV PUTM proyek PWM DIY.

Seiring dengan perjalanan PUTM, persoalan ijazah formal ini ternyata terus menjadi pertanyaan dari para thalabah. Bahkan para thalabah angkatan V dan VI PUTM Proyek PP. Muhammadiyah juga kembali mempertanyakan soal ijazah formal setelah selesai mengikuti pendidikan di PUTM kelak. Bahkan santri baru angkatan 2007, begitu mendengar bahwa PUTM tidak sama dengan perguruan tinggi dan kelak setelah lulus tidak akan memperoleh ijazah formal ada yang menyatakan mengundurkan diri dari PUTM.⁴³

Badan Pelaksana Harian PUTM PP. Muhammadiyah). Kemudian pada bulan Juli 2007, melalui Surat Nomor: 10/I.0/BPH/K/2007 tertanggal 1 Juli 2007, Pimpinan Pusat Muhammadiyah kembali melakukan penyempurnaan atau penambahan personil yang duduk dalam pengurus Badan Pelaksana Harian (BPH) Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) PP. Muhammadiyah, dengan susunan kepengurusan yang sama dengan sebelumnya, tetapi ada penambahan personil baru untuk anggota, yaitu: Prof.Dr. Syamsul Hadi, MA., Drs. H. Muhadjir Efendi, MAP., dan Prof. Dr. H. Imam Suprayogo.

⁴³ Hasil wawancara dengan Budi, alumni PUTM tahun 2006 yang sedang melakukan pengabdian wajib di PUTM sebagai Pembantu Bidang Akademik, tanggal 12 Maret 2007. Menurut Budi, di antara faktor yang mempengaruhi santri keluar atau mengundurkan diri dari PUTM adalah karena persoalan ijazah: "kalau anak-anak (santri) disurvei, rata-rata yang keluar itu karena: pertama, masalah ijazah; kedua, karena ada keluarganya yang berani menjamin kuliah; dan

Sebagian pengelola PUTM juga bisa memahami manakala persoalan legal-formal menjadi kegelisahan para santri/thalabah. Sebab bagaimanapun mereka akan kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan pendidikan di PUTM. Sementara untuk saat ini, masyarakat di lingkungan Muhammadiyah juga selalu mempersoalkan ijazah formal⁴⁴, akibat peraturan pemerintah yang menghendaki semacam itu.

Terkait dengan permasalahan yang mendera para santri/thalabah PUTM, baik masalah kejenuhan maupun ijazah formal, sebenarnya almarhum K.H. Ahmad Azhar Basyir juga selalu menekankan perlunya diupayakan tumbuhnya minat (motivasi) kader muda Muhammadiyah untuk dididik menjadi kader ulama sekaligus sebagai langkah antisipatoris kelangkaan ulama di kalangan Muhammadiyah.⁴⁵

Ungkapan senada sebenarnya juga sering disampaikan oleh beberapa dosen muda yang kebetulan direkrut menjadi dosen di PUTM. Mereka sering memotivasi para santri/thalabah agar kelak setelah selesai dari PUTM mengambil kuliah di perguruan tinggi, agar memiliki ijazah

ketiga, merasa sudah lama pernah tinggal di pondok, sementara bayangan awal tentang PUTM tidak seperti apa yang senyatanya terjadi.

⁴⁴ Menurut ustadz Zaini Munir, "idealisme PUTM yang hanya melakukan reproduksi ulama, sering tersandung, terutama ketika menghadapi masyarakat. Alumni butuh senjata untuk bisa diterima oleh masyarakat (lembaga pendidikan). Harus diingat, bahwa masyarakat warga Muhammadiyah sudah terpola dengan pola formalitas. Akhirnya mereka bersikap setengah hati dalam menerima alumni PUTM, karena mereka juga dituntut persyaratan formalitas. Barusan saja ada alumni yang bercerita, bahwa untuk mengajar di tingkat SD saja mereka ditanyai persoalan formalitas (Ijazah). Jadi sekarang idealitas berhadapan dengan realitas. Itu sebabnya, alumni PUTM banyak yang kemudian mengambil kuliah lagi untuk meraih kesarjanaan. Kondisi demikian menunjukkan, betapa sebenarnya bukti formalitas sangat dibutuhkan. Maka hampir 99% alumni PUTM mencari ijazah, karena terhambat oleh kenyataan, bahwa masyarakat Muhammadiyah sendiri selalu menanyakan hal tersebut". Hasil wawancara dengan ustadz Zaini Munir, Wakil Mudir I Bidang Akademik PUTM, tanggal 11 Maret 2007.

⁴⁵ Al-Marhum KH. Ahmad Azhar Basyir pernah mengatakan: "Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana menumbuhkan minat kalangan generasi muda Muhammadiyah untuk dididik menjadi kader ulama, khususnya kader tarjih, yang pada umumnya hari depan mereka tidak akan seperti yang dialami oleh rekan-rekan mereka yang belajar di sekolah-sekolah umum atau madrasah-madrasah SKB Tiga Menteri. Untuk mengatasi kekhawatiran mereka akan masa depannya, kiranya dapat mulai dirintis kemungkinan-kemungkinan mereka melanjutkan di tingkat Pendidikan Tinggi, dan tentu saja seharusnya juga mendapatkan tempat (dijamin fasilitasnya) untuk bekerja di lingkungan Muhammadiyah" Dikutip dari Dokumen "

formal, sebagai bekal untuk menghadapi masyarakat yang semakin formalistis.⁴⁶

Menyadari akan nasibnya di masa depan, beberapa alumni PUTM yang sedang menjalani masa pengabdian wajib setelah selesai masa pendidikan berusaha memanfaatkan waktu untuk mengambil kuliah di berbagai perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta, baik UAD, UMY, UCY, maupun IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beberapa di antara mereka yang mengambil kuliah, saat ini bahkan ada yang sudah menjadi PNS (dosen dan guru) di berbagai lembaga pendidikan baik di dalam maupun di luar Yogyakarta. Beberapa di antaranya bahkan sudah mengambil pendidikan pada jenjang master (S-2) dan ada yang mempersiapkan diri untuk mengambil program doktor.⁴⁷

Di sisi lain, dalam menyikapi persoalan ijazah formal yang senantiasa menjadi kegelisahan santri/thalabah, BPH PUTM pada tanggal 2 Maret 2007 melaksanakan rapat di kantor PP. Muhammadiyah jalan KH. A. Dahlan 103 Yogyakarta. dengan agenda “membahas sistem pendidikan di PUTM”.⁴⁸ Rapat BPH PUTM dilanjutkan pada tanggal 16 Maret 2007 Jum’at, 16 Maret 2007 di Kampus PUTM Jl. Kaliurang Km. 23, Ngipiksari, Pakem, Sleman Yogyakarta dengan agenda “mengumpulkan informasi tentang sistem pendidikan PUTM”.⁴⁹ .

Berdasar hasil rapat BPH disepakati bahwa jalan untuk bisa merubah sistem pendidikan di PUTM adalah melalui sidang Tanwir Muhammadiyah, agar ustadz Ibnu Juraim bisa memahami dan mau menerima. Melalui sidang

⁴⁶ Wiharto, alumni PUTM angkatan II proyek PWM, menceritakan, bahwa salah satu dosen IAIN (UIN) yang mengajar di PUTM selalu bilang: “Anda besuk harus mengambil kuliah. Kalau anda tidak kuliah, anda hanya akan menjadi kyai kampung. Memang dari sisi fatwa, fatwa anda kuat karena anda mampu mendasarkan fatwa tersebut dari berbagai rujukan kitab. Tetapi, ya itu anda hanya akan berada pada level kampung, tidak bisa atau sulit mencapai level yang lebih atas”. (Hasil wawancara dengan Wiharto, alumni PUTM tahun 1998 dan Guru PAI di SMK Negeri I Yogyakarta, tanggal 26 Desember 2007).

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Lihat, Undangan Rapat BPH PUTM, Jum’at 2 Maret 2007. Tokoh-tokoh yang diundang adalah: Drs. H. Fahmi Muqaddas, M.Hum., Drs. H. Dahwan, M.Si., Drs. H. Hadjam Murusydi, SU., Drs. HM. Anis, MA., H. Rosil Bakir, MBA., Ir. H. Dasron Hamid, M.Sc., H. Anang Rikza Masyhadi, Lc., Dr. H. Muh. Ihsan, Prof. Dr.H. Syamsul Hadi, MA., dan Drs. H, Muhadjir Efendi, MAP

⁴⁹ Lihat, Undangan Rapat BPH PUTM, Jum’at 16 Maret 2007. Tokoh-tokoh yang diundang adalah: Drs. H. Fahmi Muqaddas, M.Hum., Drs. H. Dahwan, M.Si., Drs. H. Hadjam Murusydi, SU., Drs. HM. Anis, MA., H. Rosil Bakir, MBA., Ir. H. Dasron Hamid, M.Sc., H. Anang Rikza Masyhadi, Lc., Dr. H. Muh. Ihsan, Prof. Dr.H. Syamsul Hadi, MA., dan Drs. H, Muhadjir Efendi, MAP, Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, Nasrullah S.Ip.

Tanwir Muhammadiyah tahun 1428H/2007 M yang berlangsung pada tanggal 7-11 Rabi'ul Akhir 1428 H / 25-29 April 2007 M di Yogyakarta, permasalahan PUTM di bahas, sehingga akhirnya Sidang Tanwir memutuskan menyetujui jika Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) dijadikan sebagai lembaga pendidikan untuk perkaderan tarjih yang berijazah formal.⁵⁰

Keputusan ini didasarkan pada satu pertimbangan bahwa selama ini lembaga PUTM masih bersifat lembaga nonformal dengan metode belajar yang masih memberi kesan mempertahankan sistem pendidikan klasik dalam pendidikan keagamaan. Dalam suasana masyarakat sekarang yang cenderung kepada sistem pendidikan formal, sistem pendidikan yang diterapkan di PUTM, tampaknya berpengaruh terhadap kurangnya animo masyarakat, yang pada gilirannya kualitas calon *thalabah* bukan calon yang "terunggul".⁵¹

Meski dari sisi legal formal sudah ada pijakan untuk memberikan ijazah kepada alumni PUTM angkatan V dan VI, tetapi untuk membicarakannya dengan ustadz Suprpto Ibnu Juraim membutuhkan waktu yang tepat, karena kondisi kesehatannya sedang labil. Namun demikian akhirnya diputuskan untuk melakukan sosialisasi hasil keputusan sidang Tanwir terkait dengan PUTM kepada ustadz Ibnu Juraim melalui beberapa kali rapat BPH baik pada tanggal 16 Mei, 21 Juni, dan 20 September 2007 dengan agenda "menindaklanjuti keputusan Tanwir tentang PUTM (sistem pendidikan, pengorganisasian, kelembagaan, pengelolaan)".⁵²

Berita munculnya keputusan tanwir terkait dengan sistem pendidikan di PUTM, sebenarnya cukup mengejutkan ustadz Suprpto Ibnu Juraim, meski akhirnya juga mau menerima. Sebab selama ini beliau adalah satu-satunya tokoh yang tetap bersikukuh dengan pendirian bahwa alumni PUTM tidak perlu diberi ijazah formal, selain hanya sertifikat kelulusan.⁵³

⁵⁰ PP. Muhammadiyah, Berita Resmi Muhammadiyah Nomor 4/2007., hlm. 25

⁵¹ Ibid., hlm. 138

⁵² Lihat, Undangan Rapat BPH PUTM, 16 Mei, 21 Juni, dan 20 September 2007. Tokoh-tokoh yang diundang adalah: Drs. H. Fahmi Muqaddas, M.Hum., Drs. H. Dahwan, M.Si., Drs. H. Hadjam Murusydi, SU., Drs. HM. Anis, MA., H. Rosil Bakir, MBA., Ir. H. Dasron Hamid, M.Sc., Kyai HM.S. Ibnu Juremi, Drs. H. Zaini Munir Fadloli, M.Ag., dan Drs. H. Hamdan Hambali

⁵³ Hal ini bisa dipahami dari pernyataan beliau: "Terkait dengan rencana PUTM akan disetarakan dengan S-1 dan akan diberi ijazah formal, sebenarnya saya tidak diajak musyawarah. Mereka yang pro dengan gagasan tersebut menggunakan sidang tanwir untuk memutuskan supaya PUTM disetarakan

IV. Penutup

Uraian di atas setidaknya memberikan gambaran bahwa dalam menjaga kelangsungan atau kontinuitas pendidikan pesantren, ada beberapa perubahan yang terjadi dalam sepanjang sejarah PUTM Yogyakarta. Pertama, perubahan dalam pola pengelolaan. Pengelolaan pesantren PUTM yang pada masa awal-awal berdirinya seolah hanya dipegang oleh KH. Umar Afandi, dalam perkembangannya ternyata beliau tidak mampu menjaga eksistensi pesantren. Pesantren PUTM yang sudah mencoba bertahan sampai beberapa angkatan, kemudian seolah hilang tertelan oleh sejarah, sehingga kalangan Muhammadiyah pun hampir-hampir merasa asing ketika mendengar nama pondok pesantren PUTM.

Beruntung pada tahun 1990-an Pengurus Wilayah Muhammadiyah DIY berkenan membangkitkan kembali pondok pesantren PUTM, dan mengambil alih kendali pengelolaan. Di bawah payung PWM DIY pondok pesantren PUTM seolah kembali menemukan daya vitalnya dan kembali berkibar sampai bisa meluluskan beberapa angkatan santri. Bahkan ketika PP. PUTM semakin dikenal kalangan publik Muhammadiyah, akhirnya pengelolaan pesantren PUTM dikembalikan lagi kepada PP. Muhammadiyah bidang Tarjih. Kembalinya pengelolaan PP. PUTM ke tangan PP. Muhammadiyah bidang Tarjih, sebenarnya sama dengan mengembalikan tanggungjawab pengelolaan PUTM kepada lembaga yang pada awalnya merestui dan memback-up kelahiran dan perjalanan pendidikan pada pondok pesantren PUTM pada fase awal.

Kedua, perubahan kurikulum pendidikan. Untuk memberikan bekal kepada para santri dengan bekal yang cukup untuk menghadapi perubahan dan perkembangan zaman, pengelola pondok pesantren PUTM selalu melakukan revisi atau perubahan terhadap kurikulum pendidikan, terutama materi-materi pelengkap atau penunjang.⁵⁴ Adapun program PUTM yang murni, yang sering disebut sebagai materi kuliah pokok, secara prinsipil, tidak ada perubahan. Seperti kitab-kitab yang dikaji, dari dulu sampai sekarang masih standar, meliputi: tafsir, tata bahasa, fiqh, dan tasawuf. Kitab-kitab tersebut, misalnya adalah Ta'limul Muta'allim, Jurumiyah, Alfiyah, Tafsir Jalalain, Ihya al-Ghazali, Subulus Salam, Nailul Author, Almaraghi, Al-manar, dan lain-lain.⁵⁵

Ketiga, orientasi lulusan pesantren. Pada awal berdirinya, pendirian pesantren PUTM dimaksudkan untuk mencetak kader-kader ulama Tarjih.

dengan S-1. Karena sudah menjadi keputusan Tanwir, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa" (Hasil wawancara dengan ustadz Suprpto Ibnu Juraim, tanggal 10 Januari 2008)

⁵⁴ Hasil wawancara dengan ustadz Zaini Munir, Maret 2007

⁵⁵ Ibid.

Ulama yang dipahami pada saat itu adalah seorang yang memiliki penguasaan atas-ilmu-ilmu keislaman. PUTM sama sekali tidak berpretensi melahirkan ulama yang berijazah formal, tetapi alumni yang “mumpuni” dalam hal agama. Oleh karenanya PUTM tidak pernah mengeluarkan ijazah formal bagi para alumninya. Namun kebijakan tersebut ternyata tidak menyurutkan niat dari beberapa alumni PP. PUTM untuk mencari ijazah formal S-1 melalui kuliah di perguruan tinggi.⁵⁶ Kasus “pemberontakan”⁵⁷ ini memang sempat menjadi pro dan kontra di kalangan pengelola PUTM.⁵⁸ Tetapi kasus tersebut justru menjadi “momentum” bagi para santri angkatan berikutnya untuk menuntut pengelola agar PUTM memikirkan masa depan alumni dengan membekali ijazah formal.

Polemik tersebut kemudian berakhir melalui solusi alternatif, yakni PP.PUTM tetap tidak mengeluarkan ijazah formal, tetapi mencarikan jalan keluar bagi para alumninya untuk bisa mendapatkan ijazah formal S-1 melalui kerja sama PUTM dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta maupun Universitas Ahmad Dahlan.

Berbagai perubahan yang dilakukan dalam rangka menjaga eksistensi pendidikan pada pesantren PUTM memang sesuatu yang tidak dapat dihindarkan mengingat perubahan sosial dalam masyarakat yang sedemikian cepat. Namun demikian, ada satu hal yang nampaknya juga merupakan faktor pendukung tetap eksisnya PP.PUTM, yakni penyelenggaraan pendidikan gratis. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa untuk belajar di PP. PUTM, para santri sama sekali tidak dipungut biaya pendidikan. Sebaliknya para santri bahkan diberi fasilitas makan, tempat tidur, dan fasilitas pendidikan lain secara gratis.

Tetapi untuk jangka panjang pengelola PP. PUTM juga perlu memikirkan kembali in put santrinya. Artinya ketika sebagian besar alumni PP. PUTM “seolah” hanya menjadikan PP.PUTM sebagai batu loncatan, maka prioritas penerimaan sebaiknya diutamakan pada warga Muhammadiyah yang cerdas yang berasal dari kalangan ekonomi

⁵⁶ Ada di antara alumni yang mengambil kuliah S-1 di IAIN/UIN Sunan Kalijaga, Universitas Ahmad Dahlan, dan lain-lain. Bahkan kemudian ada alumni yang meneruskan ke jenjang S-2 dan S3.

⁵⁷ Istilah “pemberontakan” ini diucapkan oleh salah seorang alumni yang saat ini menjadi guru agama di salah satu sekolah negeri di Yogyakarta. Beliau menggunakan istilah demikian karena ketika alumni PUTM mengambil kuliah berarti ia telah keluar dari frame PUTM yang ingin mendidik/mengkader calon ulama Tarjih, bukan calon Pegawai Negeri Sipil.

⁵⁸ Pihak yang kontra, sebagaimana diuraikan di atas didukung oleh ustadz Suprpto Ibnu Juraim. Sedangkan pihak yang pro didukung oleh para anggota BPH dan sebagian staff pengajar yang berasal dari perguruan tinggi.

menengah ke bawah. Sebab jika tidak demikian, bisa jadi yang menerima kesempatan mengikuti pendidikan gratis bukan mereka yang benar-benar membutuhkan pendidikan, melainkan mereka yang sebenarnya memiliki kemampuan secara ekonomi tetapi ingin memperoleh fasilitas pendidikan gratis dari Muhammadiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid, "Bagaimana Mengantisipasi Perubahan" *Jurnal Pesantren No. 2/Vol.IV/1987* (Jakarta: P3M, 1987)
- Azyumardi Azra, "Pesantren Kontinuitas dan Perubahan" dalam Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos, 1999)
- Choeron Chusein, "Persoalan Fungsi, Bukan Status", *Jurnal Pesantren No. 2/Vol.IV/1987* (Jakarta: P3M, 1987)
- Dokumen Pengembangan PUTM tahun 2006
- Habib Chirzin, 1974, "Agama, Ilmu dan Pesantren" dalam M. Dawam Rahardjo (Ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES
- Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1987)
- HM. Amin Haedar dan Abdullah Hanif (Ed.), 2004, *Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*, Jakarta: IRD Press
- Imam Tholkhah, "Profil Lembaga Penyiapan Ulama", *Jurnal Pesantren No. 2/Vol.IV/1987* (Jakarta: P3M, 1987)
- Masdar F. Mas'udi, "Ulama dalam Rekayasa (?)", *Jurnal Pesantren No. 2/Vol.IV/1987* (Jakarta: P3M, 1987)
- M. Dawam Rahardjo, 1995, "Dunia Pesantren dalam Peta Pembaharuan" dalam M. Dawam Rahardjo (Ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES
- Munawir Syadzali, "Ulama yang Berwawasan dan Tidak Romantis", *Jurnal Pesantren No. 2/Vol.IV/1987* (Jakarta: P3M, 1987)
- "Naskah Ensiklopedi Muhammadiyah Jilid II I-N", (Yogyakarta: Majelis Pustaka PP. Muhammadiyah, 2000)
- Nurcholish Madjid, "Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren" dalam M. Dawam Rahardjo (Ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun Dari Bawah* (Jakarta: P3M, 1985)

- Panitia Muktamar Muhammadiyah ke 42, *Buku Panduan Muktamar Muhammadiyah ke 42, 15-19 Desember 1990 di Yogyakarta*
- PP. Muhammadiyah, *Berita resmi Muhammadiyah Edisi Khusus "Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 41 di Surakarta tanggal 7-11 Desember 1985 Masehi/24-28 Rabi'ul Awal 1406 Hijriah"*
- PP. Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah Nomor: 100 tahun 1985*
- PP. Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah Nomor 04 / 2003 "Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 58/Kep/I.0/B/2003, tentang Tanfidz Tanwir Muhammadiyah Tahun 1424 H/2003 M di Makassar"*
- PP. Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah Nomor: 01/2005, Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang*
- Uswatun Chasanah, *Kehidupan dan Perjuangan Ayahku, Riwayat Hidup KHR. Hadjid*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005)
- William F. O'neil, *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, terj. Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002);
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1982)